



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KAB. NGANJUK  
TAHUN 2018**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum .....	1
B. Gambaran Umum SKPD .....	2
1. Tugas pokok dan Fungsi, struktur oraganisasi, jumlah pegawai serta komposisi pegawai menurut golongan dan pendidikan .....	2
2. Visi dan Misi SKPD .....	10
3. Strategi dan arah kebijakan SKPD .....	15
4. Prioritas kegiatan/urusan SKPD .....	17
 <b>BAB II URAIAN KEGIATAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK .....</b>	 <b>18</b>
A. Prioritas Urusan Wajib Pekerjaan Umum .....	18
1. Program dan Kegiatan .....	18
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	30
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Urusan Wajib .....	58
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	58
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran .....	65
6. Proses Perencanaan Pembangunan .....	90
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan .....	90
8. Permasalahan dan Solusi .....	90
9. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan .....	90
B. Indikator Kinerja Kunci .....	90
1. Tataran Pengambil Kebijakan.....	90
Aspek terobosan / inovasi baru dalam Penyelenggraan Pemerintahan Daerah .....	90
2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan .....	91
2.1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan .....	91
2.2. Ketaatan terhadap peraturan per undang-undangan .....	91
2.3. Penataan kelembagaan daerah .....	92
2.4. Pengelolaan kepegawaian daerah .....	92
2.5. Perencanaan pembangunan daerah .....	92
2.6. Pengelolaan keuangan daerah .....	93

2.7. Pengelolaan barang milik daerah .....	94
2.8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat .....	94
3. Tataran Pelaksanaan Kebijakan aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan	
3.1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum .....	95
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>96</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Strategi dan Kebijakan .....	16
Tabel 2.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jalan .....	30
Tabel 2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jasa Konstruksi.....	31
Tabel 2.3	Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian secara Nasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jalan .....	31
Tabel 2.4	Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian secara Nasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jasa Konstruksi .....	32
Tabel 2.5	Realisasi Pencapaian dan Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jalan .....	32
Tabel 2.6	Realisasi Pencapaian dan Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jasa Konstruksi .....	33
Tabel 2.7	Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Fisik/Kegiatan dari dana APBD Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir tribulan IV Tahun Anggaran 2014 .....	33
Tabel 4.1	Kualifikasi dan Jumlah Pegawai yang menangani Urusan Wajib Pekerjaan Umum .....	64
Tabel 5.1	Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk .....	66

Gambar 1.1	Bagan Pelaksana Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk .....	60
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk .....	61
Gambar 3.1	Bagan Susunan Organisasi unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum bina marga .....	62
Gambar 4.1	Bagan Susunan Organisasi unit pelaksana teknis dinas laboratorium konstruksi .....	62



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan :

- ✚ Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- ✚ Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

### B. Gambaran Umum SKPD

#### 1. Tugas Pokok Dang Fungsi, Struktur Organisasi, Jumlah Pegawai Serta Komposisi Pegawai Menurut Golongan Dan Pendidikan

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

#### I. TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### II. FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

##### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;



- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- a) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan Teknis

Bidang Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan.

Bidang Perencanaan Teknis mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penghimpunan, penyusunan dan pengelolaan data teknis dalam rangka perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis;
- d. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan di bidang perencanaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;



- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data teknis meliputi:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- b) melaksanakan pengelolaan data teknis meliputi:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;untuk menyusun perencanaan dalam rangka menentukan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan.
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah

Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas:

- a) melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan meliputi:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- b) melaksanakan penyusunan laporan di bidang perencanaan:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;untuk menyusun perencanaan dalam rangka menentukan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan.
- c) melaksanakan pengadaan tanah untuk:
  - 1. jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
  - 2. sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya;
  - 3. gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknis sesuai dengan tugasnya.

## 3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga;





- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Peningkatan Jalan

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan jalan beserta bangunan pelengkap;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan jalan beserta bangunan pelengkap;
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkap;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkap;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta karya meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung negara dan fasilitas umum, rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
- c. pengelolaan dan pembangunan gedung negara dan fasilitas umum, penataan ruang kawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban serta pengendalian pembangunan gedung dan fasilitas umum;
- e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan lokasi PKL;
- f. pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Tata Bangunan



Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang bangunan;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata bangunan;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang tata bangunan meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung;
- d) menetapkan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung permanen, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di tempat bencana, strategi kebijakan mengenai bangunan gedung dan lingkungannya;
- e) memberikan fasilitas pelaksanaan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- f) melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- g) melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung dan fasilitas umum;
- h) memberikan rekomendasi IMB;
- i) menetapkan, mengawasi, dan menertibkan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Tata Ruang

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang tata ruang meliputi rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penataan lokasi PKL, sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- d) menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang termasuk penataan lokasi PKL;
- e) memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang;
- f) mengawasi dan menertibkan pelaksanaan penataan ruang;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum pengairan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi  
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas:
  - a) merumuskan kebijakan teknis Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
  - b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
  - c) membina dan melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
  - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas:
  - a) merumuskan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkap;
  - b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkap;
  - c) membina dan melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkap;
  - d) menyusun rencana tata tanam global, menyediakan dan membagi air irigasi;
  - e) meneliti operasi, hidrologi dan hidrometri;
  - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- 3) Seksi Bina Irigasi  
Seksi Bina Irigasi mempunyai tugas:
  - a) merumuskan kebijakan teknis Seksi Bina Irigasi;
  - b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Bina Irigasi;
  - c) membina dan melaksanakan tugas Seksi Bina Irigasi meliputi pengelolaan pembentukan wadah koordinasi, pemberdayaan kelembagaan, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai, jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkap;
  - d) membentuk komisi irigasi dan mengelola aset irigasi;
  - e) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkap;
  - f) menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai;
  - g) melaksanakan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - h) memberi izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;



- i) melaksanakan fasilitasi dan pendampingan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (G-HIPPA) dalam pengelolaan jaringan irigasi;
- j) memberi izin pemanfaatan tanah pengairan;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan

Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina jasa konstruksi dan peralatan.

Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina jasa konstruksi dan peralatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi dan Peralatan, termasuk pembinaan terhadap penyedia jasa, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang jasa konstruksi dan operasional;
- c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 1) Seksi Bina Jasa Konstruksi

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

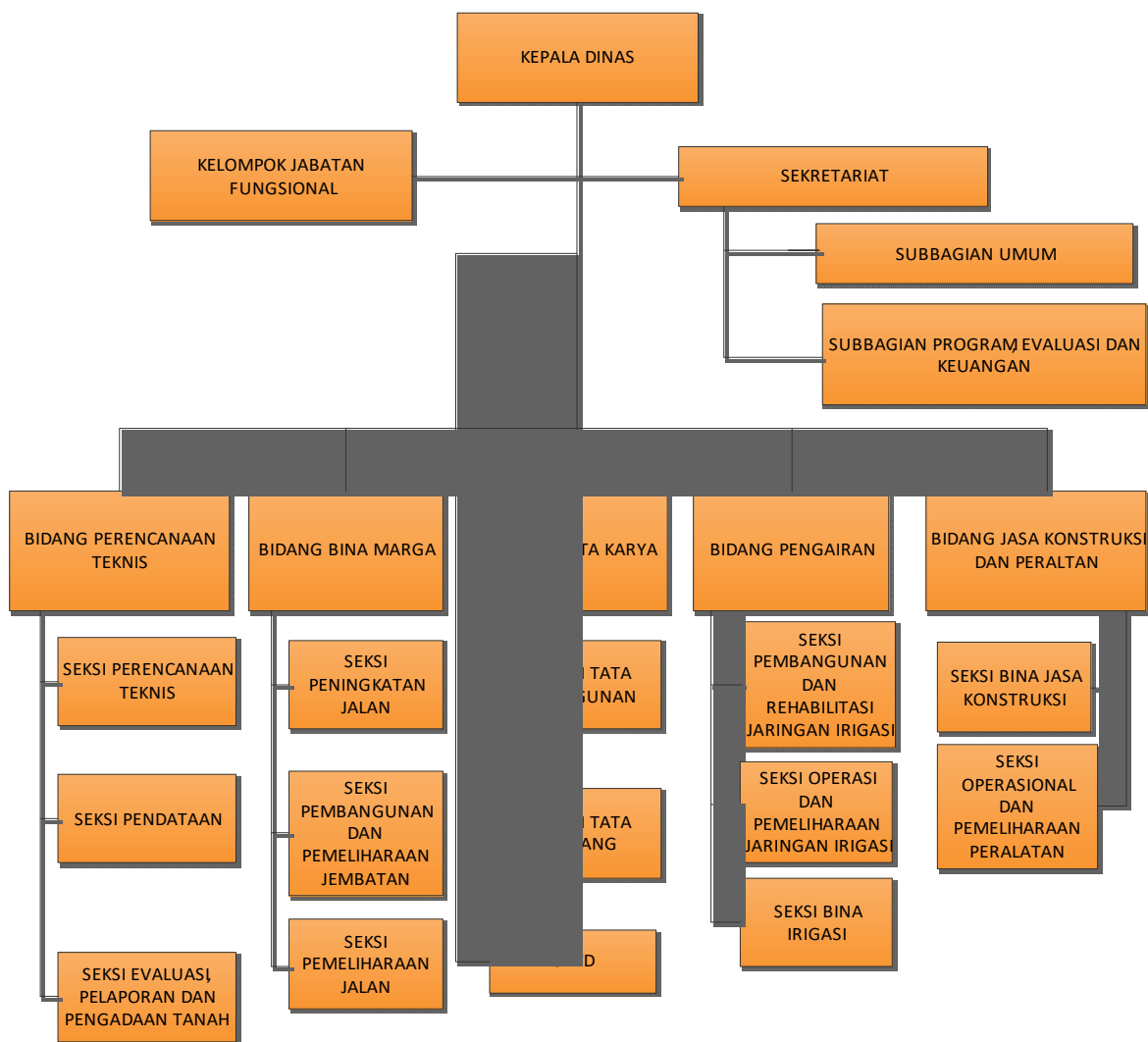
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina jasa konstruksi;
- b. membina dan melaksanakan tugas di bidang bina jasa konstruksi termasuk peningkatan kemampuan teknologi terhadap jasa konstruksi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina jasa konstruksi;
- d. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan;
- c) melaksanakan rekapitulasi usulan pengadaan dan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan/penelitian terhadap operasional dan pemeliharaan peralatan serta inventarisasi dan dokumentasi pada semua barang secara sistematis;
- d) mengelola alat-alat berat dan kendaraan dinas beserta pemeliharaannya;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN NGANJUK**



**Gambar 1.1**

Selanjutnya bila merujuk pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk :

- UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah;
- Wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya;
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat UPTD mempunyai fungsi :
  - a) Pelaksanaan tugas teknis dinas dari organisasi induknya sesuai dengan bidangnya.
  - b) Pelaksanaan urusan administrasi.



7. Susunan Organisasi UPTD
  - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
    - UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi (Kelas B).
    - UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING (Kelas A).
    - UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR (Kelas A).
  - b. Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :
    - d. Kepala UPTD;
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1. UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian tanah, bahan, dan konstruksi.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang pekerjaan pengujian tanah, bahan dan konstruksi ;
2. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan pengujian tanah, bahan dan konstruksi ;
3. pengumpulan, pengolahan, pengusulan dan perencanaan di bidang pekerjaan pengujian tanah, bahan dan konstruksi ;
4. pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional di bidang pekerjaan pengujian tanah, bahan dan konstruksi ;
5. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pengujian tanah, bahan dan konstruksi serta pendukungnya ;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

##### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi terdiri dari :

###### A. Kepala UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi.

Kepala UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas :

1. melaksanakan, mendata, merencanakan, menganalisa, mengolah, mengawasi dan melaporkan hasil terhadap pengujian tanah, bahan dan konstruksi ;
2. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap keadaan tanah, bahan, dan konstruksi ;
3. melakukan penelitian dan pengkajian penggunaan bahan dan konstruksi ;
4. melakukan pengujian terhadap kualitas hasil pembangunan ;
5. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di bidang pengujian, bahan dan konstruksi;
6. menyusun laporan hasil penelitian dan pengujian serta memberikan saran pertimbangan tentang keadaan tanah dan konstruksi.



## B. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 2. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL

#### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan jembatan.

#### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
2. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;
3. pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;
4. pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkap nya ;
5. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
6. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

#### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL terdiri dari :

##### A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

##### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan;
2. mengelola kepegawaian, keuangan UPTD ;
3. mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

## C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Rejoso;
- Kecamatan Bagor; dan
- Kecamatan Wilangan

3. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan jembatan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang pekerjaan umum ;
2. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
3. pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;
4. pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkap nya ;
5. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
6. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

##### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON terdiri dari :

###### A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

###### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan;
2. mengelola kepegawaian, keuangan UPTD ;
3. mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

###### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.





3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Tanjunganom;
- Kecamatan Pace;
- Kecamatan Prambon; dan
- Kecamatan Sukomoro.

#### 4. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan jembatan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang pekerjaan umum ;
2. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
3. pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;
4. pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkap nya ;
5. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
6. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

##### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO terdiri dari :

###### A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

###### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan;
2. mengelola kepegawaian, keuangan UPTD ;
3. mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

###### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.



2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Kertosono;
- Kecamatan Baron;
- Kecamatan Ngronggot; dan
- Kecamatan Patianrowo.

5. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan jembatan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang pekerjaan umum ;
2. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
3. pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;
4. pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkap nya ;
5. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
6. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

##### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN terdiri dari :

##### A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

##### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan;
2. mengelola kepegawaian, keuangan UPTD ;
3. mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

##### C. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Gondang;
- Kecamatan Lengkong;
- Kecamatan Ngluyu; dan
- Kecamatan Jaticalen.

6. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan jembatan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang pekerjaan umum ;
2. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
3. pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;
4. pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkap nya ;
5. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
6. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

##### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET terdiri dari :

###### A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

###### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan;
2. mengelola kepegawaian, keuangan UPTD ;



3. mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

#### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Loceret;
- Kecamatan Berbek;
- Kecamatan Sawahan; dan
- Kecamatan Ngetos.

#### 7. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di Bidang pengairan.
2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air irigasi;
5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas fungsi pemanfaatan pemakaian air irigasi, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan bangunan di atas perairan umum;
6. Pelaksanaan pelaporan teknis operasi dan pemeliharaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

##### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR terdiri dari :

- A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR.



Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

#### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan.
2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD.
3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

#### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Pace;
  - Kecamatan Ngetos;
  - Kecamatan Berbek
  - Kecamatan Loceret;
  - Kecamatan Sukomoro; dan
  - Kecamatan Tanjunganom.
8. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI.

#### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan.

#### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di Bidang pengairan.
2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air irigasi;
5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas fungsi pemanfaatan pemakaian air irigasi, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan bangunan di atas perairan umum;
6. Pelaksanaan pelaporan teknis operasi dan pemeliharaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya;



8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI terdiri dari :

#### A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

#### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan.
2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD.
3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

#### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan jalan dan jembatan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Prambon;
- Kecamatan Tanjunganom;
- Kecamatan Baron;
- Kecamatan Kertosono;
- Kecamatan Sukomoro;
- Kecamatan Ngronggot;
- Kecamatan Patianrowo
- Kecamatan Lengkong; dan
- Kecamatan Jaticalen.

#### 9. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di Bidang pengairan.
2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;



3. Pelaksanaan inventarisasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air irigasi;
5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas fungsi pemanfaatan pemakaian air irigasi, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan bangunan di atas perairan umum;
6. Pelaksanaan pelaporan teknis operasi dan pemeliharaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS terdiri dari :

#### A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

#### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan.
2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD.
3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

#### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan jalan dan jembatan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Wilangan;
- Kecamatan Bagor;
- Kecamatan Nganjuk;
- Kecamatan Sukomoro;
- Kecamatan Rejoso; dan
- Kecamatan Gondang.

#### 10. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING.

##### I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan.

##### II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai fungsi :



1. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di Bidang pengairan.
2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air irigasi;
5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas fungsi pemanfaatan pemakaian air irigasi, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan bangunan di atas perairan umum;
6. Pelaksanaan pelaporan teknis operasi dan pemeliharaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

### III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING terdiri dari :

#### A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

#### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan.
2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD.
3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

#### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan jalan dan jembatan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Wilangan;
- Kecamatan Bagor;
- Kecamatan Rejoso;
- Kecamatan Nganjuk;
- Kecamatan Sukomoro;
- Kecamatan Ngluyu;
- Kecamatan Tanjunganom; dan
- Kecamatan Gondang.

#### 11. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR.

##### I. TUGAS POKOK





UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan.

## II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di Bidang pengairan.
2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air irigasi;
5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas fungsi pemanfaatan pemakaian air irigasi, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan bangunan di atas perairan umum;
6. Pelaksanaan pelaporan teknis operasi dan pemeliharaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

## III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR terdiri dari :

### A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

### B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan.
2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD.
3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD, perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

### C. Kelompok Jabatan Fungsional.

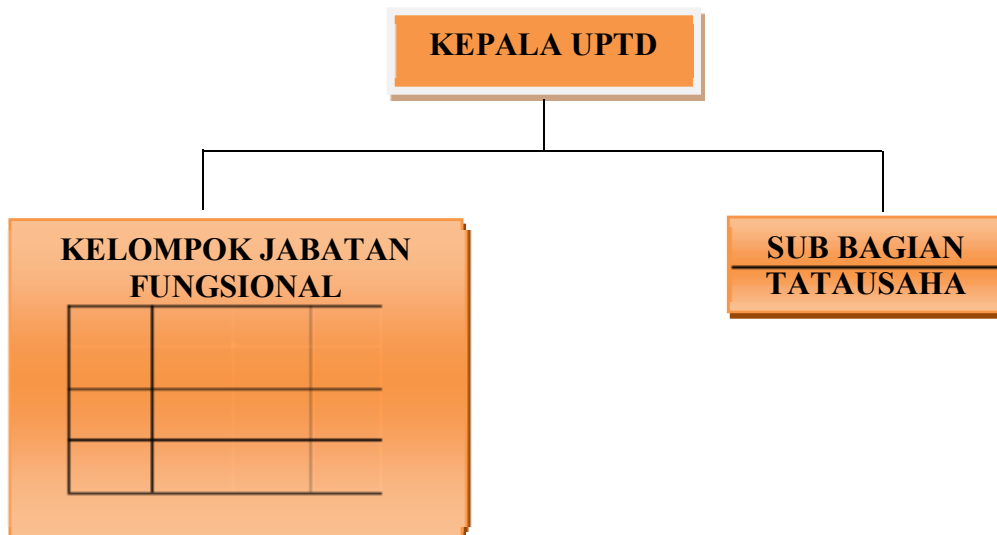
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan jalan dan jembatan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai wilayah kerja :

- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Ngetos;
- Kecamatan Berbek;
- Kecamatan Loceret;
- Kecamatan Nganjuk; dan
- Kecamatan Sukomoro.

**Gambar 1.2**  
BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (Kelas A)



**Gambar 1.3**  
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (Kelas B)



Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebanyak 275 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah

**Tabel 1.1**  
**Data Administrasi Kepegawaian**  
**Menurut Golongan**

U R A I A N	Satuan	Jumlah
<b>a. Jumlah PNS</b>		
1) Golongan I	Orang	<b>33</b>
2) Golongan II	Orang	<b>170</b>
3) Golongan III	Orang	<b>68</b>
4) Golongan IV	Orang	<b>4</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>275</b>

**Tabel 1.2**  
**Data Administrasi Kepegawaian**  
**Menurut Jabatan**

U R A I A N	Satuan	Jumlah
<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>		
- <b>Eselon II</b>	Orang	<b>1</b>
- <b>Eselon III</b>	Orang	<b>4</b>
- <b>Eselon IV</b>	Orang	<b>33</b>
<b>Jumlah Pejabat Fungsional</b>	Orang	-
- <b>Jumlah Staf PNS</b>	Orang	<b>237</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>275</b>

**Tabel 1.3 Data Administrasi Menurut**  
**Tingkat Pendidikan**

No.	U R A I A N	Satuan	Jumlah
<b>1</b>	Lulusan SD	Orang	<b>28</b>
<b>2</b>	Lulusan SLTP	Orang	<b>45</b>
<b>3</b>	Lulusan SLTA	Orang	<b>139</b>
<b>4</b>	Lulusan Paket C	Orang	-
<b>5</b>	Lulusan KPAA	Orang	-
<b>4</b>	Lulusan D2	Orang	-
<b>5</b>	Lulusan Sarjana Muda/ D3	Orang	<b>6</b>
<b>6</b>	Lulusan S-1	Orang	<b>49</b>
<b>7</b>	Lulusan Pasca Sarjana/ S.2	Orang	<b>8</b>
<b>8</b>	Lulusan Pasca Sarjana/ S.3	Orang	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>275</b>

## 2. Visi dan Misi SKPD

### Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk periode 2014 – 2018 adalah :“ **TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG OPTIMAL DAN BERKESINAMBUNGAN UNTUK Mendukung terciptanya Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Jaya dan Sejahtera.**”

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018. Rumusan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2007-2012 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, yaitu :

**Misi 5:** Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Seiring dengan upaya mendukung pencapaian misi daerah serta dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

Tahun 2014-2018, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

### **Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk**

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya untuk kelancaran arus lalu-lintas manusia, barang dan jasa dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk menunjang ketahanan pangan.
3. Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan fasilitas umum.
4. Mewujudkan penyusunan tata ruang yang lengkap dan dilandasi legalitas hukum.

### **3. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD**

Strategi adalah sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2014-2018.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Optimal Dan Berkesinambungan Untuk Mendukung Terciptanya Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Jaya Dan Sejahtera</b>
<b>Misi 1</b>	Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya untuk kelancaran arus lalu-lintas manusia, barang dan jasa dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi
<b>Misi 2</b>	Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk menunjang ketahanan pangan.



<b>Misi 3</b>	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan fasilitas umum
<b>Misi 4</b>	Mewujudkan penyusunan tata ruang yang lengkap dan dilandasi legalitas hukum
<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan proporsi belanja modal sesuai dengan kemampuan anggaran.</li> <li>2. Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi.</li> <li>3. Menempatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan prasarana jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan publik secara profesional guna menunjang clean governance dan good governance.</li> <li>5. Memanfaatkan teknologi jalan dan jembatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan Pemeliharaan jalan.</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemeliharaan jalan.</li> <li>7. Menumbuhkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan bidang jalan.</li> <li>8. Meningkatkan koordinasi antar instansi serta peran serta masyarakat, sebagai upaya memudahkan pembebasan lahan.</li> <li>9. Memprioritaskan penyelesaian pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah strategis potensial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembangunan bangunan pelayanan publik, irigasi, jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya antar daerah, antar kecamatan, antar desa, sentra-sentra produksi pertanian dan wilayah tujuan wisata.</li> <li>2. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan dan potensi ekonomi daerah.</li> <li>3. Mengembalikan kondisi jalan dan jembatan.</li> <li>4. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.</li> <li>5. Mempertahankan fungsi jalan dan jembatan.</li> <li>6. Menyelenggarakan pemutakhiran data jalan dan jembatan.</li> <li>7. Mendayagunakan peralatan berat.</li> <li>8. Mendayagunakan peralatan laboratorium kebinamargaan.</li> <li>9. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.</li> <li>10. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.</li> </ol>

**4. Prioritas kegiatan/urusan SKPD**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai prioritas kegiatan berupa : membangun jalan yang belum aspal, memelihara jalan yang rusak, memperbaiki jembatan yang rusak, membangun dan memelihara fasilitas umum, memelihara saluran irigasi, embung waduk dan bangunan penampung air lainnya, meningkatkan penataan ruang di kabupaten nganjuk, membangun jembatan di daerah yang memerlukan (daerah terpencil), memelihara dan pengadaan alat-alat berat (walles,snaper dan lain-lain). Dalam menyusun program dan kegiatan, yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun mendatang adalah dengan melihat arah kecenderungan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat dan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuannya yaitu tercapainya perencanaan pembangunan prasarana jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.



**BAB II**  
**URAIAN KEGIATAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN NGANJUK**

**II.1. URUSAN DESENTRALISASI**

**A. Prioritas Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**1. Program dan Kegiatan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

No	Program/Kegiatan
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8	Penyediaan peralatan rumah tangga
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10	Penyediaan makanan dan minuman
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
<b>II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
13	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15	Pengadaan peralatan gedung kantor
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
<b>III Program peningkatan disiplin aparatur</b>	
20	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
<b>IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
23	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
<b>V Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	
24	Pembangunan jembatan Jali (PIK)
25	Pengaspalan Dsn. Ngrajek-Sambirejo



26	Pengaspalan Jalan Jurusan Desa Sumberkepuh
27	Pembangunan jalan poros Ds. Sanggrahan
28	Pembangunan jalan antar kabupaten Bendoasri - Klangon (Madiun) (PIK)
29	Pelebaran jembatan Jurangringin dan lanjutan opritan ruas jalan Ngetos - Pogoh
30	Pembangunan jalan aspal dan jembatan Kepel - Margopatut
31	Lanjutan jalan Ds. Kepuh - Ds. Tembarak (Gang 5/Jl. Werkudoro) (Lanjutan) (PIK)
32	Pengaspalan jalan M. Yamin I Kelurahan Bogo
33	Rekontruksi jalan Pogoh Roro Kuning dan jalan pintu keluar
34	Peningkatan jalan hotmix antar desa , Ds. Demangan - Kandeg Baron (PIK)
35	Pembangunan jalan aspal antar desa, Ds. Kedungombo - Ds. Sumberkepuh (PIK)
36	Pengaspalan jalan Dr. Sutomo VI RT. 04 RW. 04
37	Pelebaran jalan Dr. Sutomo IV a, IV b, IV c
38	Pelebaran jalan aspal Jl. AR. Saleh IV RT. 01 RW. 01
39	Pembuatan jalan tembus dari Jl. Dr. Sutomo - Jl. SMP3 Kel. Banaran
40	Pembangunan makadam jalan Gondangwetan - Tegal Abe
41	Rekontruksi jalan Loceret - Tanjung
42	Jembatan antar Kecamatan (Lengkonglor-Sumbermiri)
43	Peningkatan jalan Sugihwaras - Bandung
44	Pembangunan Jembatan Prayungan
45	DED Pembangunan Jembatan Tangis
46	DED Pembangunan Jembatan Sumbersono
47	DED Pembangunan Jembatan Perempatan Kelutan
48	DED Pembangunan Jembatan Watudandang
49	Pelebaran Jembatan Ngangkatan
50	Pembangunan Sayap Jembatan Kedungngingas
51	Pembangunan Jembatan Keduk
52	Pembangunan jalan poros Ds. Bukur - Ds. Katerban
53	DED pembangunan jembatan desa Nglingsgo - Sumberejo
54	Pembangunan jalan poros Ds Ngluyu menuju Ds. Tempuran
55	Pembangunan jalan poros Pilangglenteng Ds. Balonggebang - Ds. Karangsemi
56	Pembangunan jalan tembus Dsn. Geneng atau Genjeng Ds. Jampes menuju Kec.
57	Makadam dan pengaspalan jalan cemara XI Warujayeng
58	Peningkatan jalan dari tanah ke aspal di desa Lengkong Lor Kec. Ngluyu dan Desa Losari Kec. Gondang
59	Rekontruksi jalan Pandean - Nglingsgo (PIK)
60	Rekonstruksi lanjutan jalan Desa Sendangbumen - Desa Sumberurip Kec Berbek
61	Peningkatan jalan, pada Jalan Kabupaten Bagor - Gandu
62	Pembangunan jalan Ds. Trayang - Ds. Dadapan





63	DED Jalan Lingkar Wilis (Lanjutan) ruas Bulak - Sumberrumpeng - Pasar Kepel
64	Pembangunan jembatan Blitaran (PIK)
65	Rekonstruksi jalan Genjeng - Sumberkajan
66	Jalan makadam Patuk Ds. Ngetos - Blongko
67	Peningkatan jalan loceret - tekenglagahan
68	Peningkatan jalan tekenglagahan - Panasas
69	Pembangunan jembatan Dsn. Jamusan Ds. Sonopatik
70	Peningkatan jalan poros dari aspal lapen ke aspal hot mix (lanjutan) Nglawak - Rowoharjo (PIK)
71	Pembangunan Aspal jalan poros Desa Bareng (PIK)
72	Peningkatan jalan makadam ke aspal Ds. Banjarsari - Ds. Klurahan (PIK)
73	Peningkatan jalan dari aspal ke makadam Ds. Kalianyar - Ds. Sambiroto (PIK)
74	Pemeliharaan jalan poros desa, Ds. Tegaron - Ds. Baleturi (PIK)
75	Pemeliharaan jalan Dsn Sukorejo - Ds. Klurahan - Ds. Banjarasari (PIK)
76	Pembangunan gorong-gorong pada ruas jalan Ngrami - Gondangkulon (PIK)
77	Rekontruksi jalan Kenep - Datar (PIK)
78	pembangunan jalan (hot mix) Ds. Kalianyar - Ds. Tanjung (PIK)
79	Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan dan jembatan
80	Peningkatan Jalan Ngujung - Lengkong (014) (DAK 2018)
81	Peningkatan Kapasitas Jalan Lengkong - Ngasem (020) (DAK 2018)
82	Hotmix jalan PU jalan poros Ds. Kedungombo-Desa Rowoharjo dan Jati-Tarokan
83	Pembangunan jembatan beton Dsn. Kwajon
84	Pembangunan jalan Salamjudeg - Argojali
85	Peningkatan jalan antar desa Jl. Agus Salim (PIK)
86	Pembuatan jalan baru (Jalan tembus Yuwono - Bangsri - Tembarak) (PIK)
87	Pembangunan jalan Ngrombot - Tirtobinangun dengan HRS
88	DED Pembangunan jalan poros Mojoduwur - Suru
89	Review DED Pembangunan Jembatan Gejagan
90	Peningkatan jalan Bagorkulon - Petak - Paron
91	Peningkatan jalan Sumberejo - Rejosari
92	Peningkatan jalan Ds. Sidoharjo
93	Rekonstruksi jalan Ngrawan - Oro-oro Ombo
94	Rekonstruksi jalan Ds. Pisang
95	Rekonstruksi jalan Ds. Dawuhan
96	Rekonstruksi jalan Ds. Pulowetan
97	Pembangunan jalan Dsn. Bonto Ds. Sumberkepuh
98	Pembangunan jalan Ds. Karangsemi - Balonggebang
99	Revev Design Jembatan Petak
100	Peningkatan jalan Ds. Sumberkepuh
101	Pelebaran jalan Desa Ngrenget - Desa Ngrami



102	Pengaspalan jalan tembusn Bagorwetan - Pehserut Ds. Bagorwetan ( PIK )
103	Peningkatan jalan Ds. Bandung - Ds. Mojoagung dengan Hotmix
104	Pembangunan jalan poros Mojoduwur - Suru
105	Rekontruksi jalan Sekaran - Putukrejo
106	Peningkatan jalan dari lapen ke hotmix Kenep - Nglaban
107	Pembangunan jalan poros Ds. Bajang menuju Sugihwaras
108	Perbaikan dan pelebaran jalan Gawok-Jatirejo
109	Rekonstruksi jalan Dsn. Ngepung
110	Peningkatan jalan dari makadam menjadi aspal Dsn. Pagak Ds. Cengkok-Ds. Watudandang
<b>VI Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	
111	Pelebaran gorong-gorong di Dsn. Pesukidul
112	Pembangunan gorong-gorong jalan PU ( Jalan KI.Hajardewantoro)
113	Pembangunan gorong-gorong Dusun Ngrandu
114	Rehab. Sal. Sek. Karang Tengah BKA 3(Barat Makam) Ds. Ngrenget
115	Pembangunan gorong-gorong plat duiker simpang tiga Tegalarum Ds. Pandantoyo
116	Pembangunan gorong-gorong kotak seletan perempatan Loceret
117	Peninggian gorong-gorong kotak Ds. Klodan (PIK)
118	Gorong-gorong kotak masuk SMP 2 Wilangan (PIK)
119	Gorong-gorong kotak masuk SMP I Wilangan (PIK)
120	Pembangunan Gorong Gorong Desa Kwagean
121	Pembangunan Gorong Gorong Ruas Cangkringan - Kel. Jatirejo
122	Pembangunan Gorong Gorong Ruas Barong - Warujayeng
123	Pembangunan Gorong Gorong Ruas Gondangkulon - Ngluyu
124	Pembangunan Gorong - gorong Pandantoyo
125	Pembangunan Gorong - gorong Desa Waung
126	Pembangunan Gorong Gorong Jl. Kapten Kasihin Nganjuk
127	Pembangunan Gorong Gorong Jalan Lawu Nganjuk
128	Pembuatan Gorong - gorong saluran pembuangan air Ds. Babadan
129	Pembangunan drainase jalan PU kanan kiri Dsn. Tampang
130	Pembangunan drainase Dsn. Belor Ds. Plosoharjo
131	Pembangunan drainase Ds. Mancon
132	Pembangunan drainase Ds. Wilangan



133	Pembangunan drainase depan Balai Desa Talang
134	Pembangunan gorong-gorong Senjayan - Ngujung
135	Pembangunan gorong-gorong kotak Kel. Cangkringan
136	Pembangunan gorong -gorong ruas Mangunsari - Bajulan
137	Pembangunan gorong -gorong ruas Loceret - Ngepeh
138	Pembangunan drainase jalan Gondang - Pace
139	Pembangunan drainase Ds. Tamanan
<b>VII Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>	
140	Pengaman badan jalan Gemenggeng - Kedungombo
141	Pengaman badan jalan Cerme - Mlandangan
142	Pembangunan penahan badan jalan utara SMP 3 Bagor -Balongrejo
143	Pembangunan pengaman badan jalan Ds. Sugihwaras (Prambon) - Ds. Kedungombo (Tanjunganom)
144	Pembangunan pengaman badan jalan Sonopatik - Balongrejo
145	Pembangunan pengaman badan jalan Genjeng -Macanan (lanjutan)
146	Pembangunan pengaman badan jalan Jatigreges - Cangkring Pacekulon (PIK)
147	Tembok pengaman badan jalan Dsn. Pandansili, Ds. Kweden (PIK)
148	Pembangunan pengaman badan jalan Ds Kweden
149	Pembangunan pengaman badan jalan di Ds. Betet Kec. Ngronggot
150	Penahan badan jalan Ds. Ngadirejo menuju Ds. Sonobekel
151	Penahan badan jalan Dsn. Jaruman Ds. Ngadirejo menuju Dsn. Sumber Agung Ds. Banjaranyar Kec. Tanjunganom
152	Pembangunan pengaman badan jalan Jl. Dr. Sutomo Jatirejo Nganjuk
153	Pembangunan pengaman badan jalan Jl. Gajah Mada Dsn. Sambijajar Ds. Kwagean
154	Pembangunan pengaman badan jalan poros Desa Tempuran ke Kecamatan
155	Pembangunan pengaman badan jalan jurusan Bandung - Baleturi
156	Pembangunan pengaman badan jalan jurusan Bandung - Watuumpak Ds. Mojoagung
157	Pembangunan pengaman badan jalan Kertosono - Trayang
158	Pembangunan pengaman badan jalan Ds. Nglawak
159	Pembangunan pengaman badan jalan Ds. Munung (lanjutan)
160	Pembangunan pengaman badan jalan pada ruas Ngrami - Josuman
161	Pembangunan pengaman badan jalan pada ruas Ganungkidul - Sumengko
162	Pembangunan pengaman badan jalan poros desa Jatipunggur Lengkong



163	Pembangunan penahan badan jalan, jalan raya lengkung Gondang di poros desa Banjardowo
164	Pembangunan pengaman badan jalan di pintu keluar obyek wisata Roro Kuning kiri (PIK)
165	Pembangunan pengaman badan jalan Karangsono-Genjeng (PIK)
166	Pembangunan pengaman badan jalan Pasar Ds. Kepel (PIK)
167	pembangunan Penahan jalan Ds. Nglaban (PIK)
168	Pembangunan penahan badan jalan raya Jaticalen Lengkong di poros desa Jegrek Kec Lengkong
169	Pembangunan penahan badan jalan dari bronjong Balongrejo - Buduran
170	Pengaman badan jalan Ds. Wilangan
171	Pembangunan pengaman badan jalan pada ruas Wilangan - Bomo (Proliman)
172	Pembangunan pengaman badan jalan Ds. Jatirejo
173	Pengaman badan jalan Sanan - Cangkring Pacewetan (PIK)
174	Pembangunan pengaman badan jalan Sumberurip - Grojogan
175	Pembangunan pengaman badan jalan Ds. Ketandan
176	Pembangunan pengaman badan jalan Dsn. Gedangklutuk Ds. Sawahan
177	Pengaman badan jalan Ds. Sudimoroharjo (PIK)
178	Pembangunan pengaman badan jalan Ruas Gondang kulon - Ngluyu
179	Pembangunan pengaman badan jalan Banarankulon - Ngudikan
180	Pembangunan pengaman badan jalan Kuncir - Kepel
181	Pembangunan pengaman badan jalan Musir Lor - Ngangkatan
182	Pembangunan pengaman badan jalan pada ruas sukomoro-ngrengket
VIII	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
183	Pemeliharaan jalan Mlandangan - Gondang
184	Pemeliharaan jalan Mlandangan - Cerme
185	Pemeliharaan jalan Jatigreges - Cangkring Pacekulon
186	Pemeliharaan jalan Jombok Sanan - Joho
187	Pemeliharaan jalan Pacekulon - Cerme
188	Pemeliharaan jalan poros Jetis - Gemenggeng
189	Pemeliharaan jalan Desa Plosoharjo
190	Pemeliharaan jalan Kepanjen - Bongkal
191	Rehabilitasi jalan Ngrandu - Jogolewon Ds. Putran (PIK)
192	Rehabilitasi jalan Marsinah (PIK)
193	Perbaikan jalan Aspal Wates-Ngadirejo
194	Pemeliharaan jalan Watudandang - Rowoharjo/Sugiharwas
195	Pemeliharaan jalan dengan konstruksi HRS-AC-WCL ruas jalan Baron - Kwajon
196	Pemeliharaan jalan Ds. Tanjungtani - Ds. Cengkok
197	Pemeliharaan jalan dengan konstruksi HRS-AC-WCL ruas jalan Sambikenceng - Katerban



198	Pemeliharaan jalan daerah Jurusam Sumberrejo - Mojoseto (PIK)
199	Pemeliharaan jalan aspal Karangsemi - Balonggebang (PIK)
200	Peningkatan jalan dengan konstruksi HRS - AC-WC L pada ruas jalan Kemlokolegi - Sedan (PIK)
201	Pemeliharaan jalan aspal pada ruas jalan Pandanarum Kemlokolegi - Pandanasri Lambangkuning Kertosono (PIK)
202	Pemeliharaan aspal jalan pada ruas jalan Baron timur - Pandanarum Kemlokolegi (PIK)
203	Pemeliharaan jalan aspal lingkaran Ds. Ngetos (PIK)
204	Rehabilitasi jalan Kusumoharjo Ds. Kudu (PIK)
205	Rehabilitasi jalan Dsn. Pandanasri - Ds. Lambangkuning (Lanjutan) (PIK)
206	Rehabilitasi jalan poros Ds. Pandantoyo - Ds. Pisang (Patianrowo) (PIK)
207	Perbaikan Jalan Jl. Kusuma Bangsa (PIK)
208	Pemeliharaan jalan (Hormix) Lingkungan Kramat
209	Pemeliharaan jalan Bengawan solo IX (PIK)
210	Perbaikan jalan Gatot Subroto I (PIK)
211	Normalisasi jembatan dan perbaikan jalan (Jalan poros) dari arah Ngudikan
212	Pengaspalan jalan tembus Bagorwetan - Ngrandu putren (PIK)
213	Pemeliharaan jalan aspal antar desa Kel. tanjunganom - Kel. warujayeng (Jl. gubernur suryo ) (PIK)
214	Pemeliharaan jalan Sumberagung-Banjaranyar
215	Perbaikan jalan pom bensin ke utara (Jl. Drupadi) Ds. Kepuh
216	Peninggian jalan hotmix jalan lingkungan pasar Warujayeng (PIK)
217	Rekonstruksi jalan aspal antar desa Ds. Kedungrejo - Ds. Surodadi (PIK)
218	Pemeliharaan jalan aspal antar desa Ds. Sidoharjo - Kel. Warujayeng (PIK)
219	Rekonstruksi jalan aspal antar desa Ds. jogomerto - kel. Warujayeng (PIK)
220	Pemeliharaan jalan Pacewetan Depan SMA - Sanan (HRS) (PIK)
221	Pemeliharaan jalan Cerme - Putuk Babadan (HRS)(PIK)
222	Pemeliharaan jalan Codot Kepanjen - Nglaban Loceret (PIK)
223	Perbaikan Jalan Gub. Suryo I RT. 03 RW. 03
224	Perbaikan jalan aspal Jalan Lurah Surodarmo I c
225	Perbaikan jalan Dr. Sutomo IV RT. 05 RW. 03 (barat RSUD)
226	Perbaikan jalan Letjen Sudibyo I A RW. 04
227	Pemeliharaan jalan jurusan Talun - Jintel
228	Pemeliharaan jalan jurusan Musirlor - Wengkal
229	Rehabilitasi jembatan gantung Jatikalen - Kedungtunggak
230	Pemeliharaan jalan konstruksi HRs jalan Ngangkatan - Musirlor
231	Pemeliharaan rutin aspal Hotmix poros Bajang - Gampeng
232	Pemeliharaan berkala jalan Letjend Suprpto VI dan Jl. Letjend S. Parman XI



233	Pemeliharaan berkala jalan Letjend Suprpto III dan Jl. Anjuk Ladang I
234	Pemeliharaan berkala jalan Veteran
235	Pemeliharaan berkala jalan Tirtobinangun - Begendeng
236	Pemeliharaan berkala jalan Klagen - Rejoso
237	Pemeliharaan berkala jalan Ngadiboyo - Banarankulon
238	Pemeliharaan berkala jalan Petak - Kendalrejo
239	Pemeliharaan berkala jalan Kerepkidul - Kendalrejo
240	Pemeliharaan jalan Jegreg - Sawahan
241	Pemeliharaan jalan Pinggir - Sendang Gogor
242	Pemeliharaan berkala jalan Lengkong - Sumbermiri
243	Pemeliharaan berkala jalan Dr. Soetomo
244	Pemeliharaan berkala jalan Gading - Sonoageng
245	Pemeliharaan jalan (hormix/lasto) Jl. MTSN Ngronggot
246	Pemeliharaan jalan (hotmix/lasto)
247	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Nganjuk, Bagor, Wilangan dan Sukomoro
248	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Kertosono, Baron, Patianrowo dan Jaticalen
249	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Berbek, Loceret, Ngetos dan Sawahan
250	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Gondang, Rejoso, Ngluyu dan Lengkong
251	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Tanjunganom, Pace, Prambon dan Ngronggot
252	Pemeliharaan berkala Jalan Anjuk Ladang
253	Pemeliharaan berkala Jalan Panglima Sudirman
254	Pemeliharaan berkala Jalan Gatot Subroto
255	Pemeliharaan berkala Jalan A. Yani
256	Pemeliharaan jalan Dsn. Jipangan Ds. Kutorejo ke Kel. Ringinanom
257	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan (Berm)
258	Pemeliharaan jalan Sumberkepuh - Plosorejo
259	Pemeliharaan jalan Ds. Kampungbaru - Tanjunganom
260	Perbaikan jalan aspal Ds. Bukur
261	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kec. Nganjuk, Bagor, Wilangan dan Sukomoro
262	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kec. Kertosono, Baron, Patianrowo dan Jaticalen
263	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kec. Berbek. Loceret, Ngetos dan Sawahan
264	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kec. Gondang, Rejoso, Ngluyu dan Lengkong
265	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kec. Tanjunganom, Pace, Prambon dan Ngronggot
266	Pemeliharaan rutin gorong gorong Kec. Nganjuk, Bagor, Wilangan dan Sukomoro



267	Pemeliharaan rutin gorong gorong Kec. Kertosono, Baron, Patianrowo dan Jaticalen
268	Pemeliharaan rutin gorong gorong Kec. Berbek, Loceret, Ngetos dan Sawahan
269	Pemeliharaan rutin gorong gorong Kec. Gondang, Rejoso, Ngluyu dan Lengkong
270	Pemeliharaan rutin gorong gorong Kec. Tanjunganom, Pace, Prambon dan Ngronggot
271	Rehabilitasi jalan poros Ds. Sumbersono - Ds. Pinggir
272	Pengaspalan jalan hotmix jalan poros Ds. Lengkonglor - Ds. Gampeng
273	Pemeliharaan jalan Ds. Kedungombo - Ds. Sumberkepuh
274	Pemeliharaan jalan Joho - Sumbermuneng (lanjutan)
275	Perbaikan jalan desa Banaranwetan
276	Perbaikan jalan Kel. Kauman dan HOS Cokroaminoto I
277	Perbaikan jalan Desa Bagorkulon
278	Perbaikan jalan Desa Sudimoroharjo-Jambi
279	Perbaikan jalan Desa Wilangan
280	Perbaikan jalan Gajah Mada Dk. Sambijajar Ds.Kwagean Loceret
281	Pemeliharaan jalan Sumberurip-Bulu (lanjutan)
282	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilangan - Bomo (DBHCHT)
283	Pemeliharaan berkala jalan Watudandang - Gondanglegi STA 1+100 s/d 3+100
284	Pemeliharaan jalan poros Desa antara Desa Sugihwaran - Desa Kutorejo
285	Pemeliharaan jalan poros desa, antara Desa Ngangkatan - Desa Puhkerep
286	Pemeliharaan jalan Mojorembun - Ngadiboyo (PIK)
287	Pemeliharaan jalan poros jurusan Ds. Kurungrejo - Ds. Kampungbaru/Tanjunganom (PIK)
288	Penyemiran jalan poros jurusan Ds. Singkalanyar - Ds. Mojoagung (PIK)
289	Pemeliharaan jalan Ds. Betet - Ds. Mojokendil (PIK)
290	Rekonstruksi jalan Kapas - Jatirejo (Lanjutan) (PIK)
291	Pemeliharaan jalan Musir kidul - Kedungwinong (PIK)
292	Pemeliharaan berkala jalan HOS Cokroaminoto (PIK)
293	Peningkatan jalan dengan konstruksi HRS - AC-WC L pada ruas jalan Sambiroto - Plimping Gebangkerep (PIK)
294	Pemeliharaan jalan Jekek - Kemaduh (PIK)
295	Pemeliharaan jalan Sugihan - Puhkerep (PIK)
296	Perbaikan jalan aspal Godean-Jatirejo (PIK)
297	Normalisasi jembatan dan perbaikan jalan poros Plosorejo - Ngudikan (PIK)
298	Pemeliharaan jalan aspal Dsn. Beni Sumberkepuh Kec. Tanjunganom
299	Pemeliharaan jalan aspal Dsn. Tawang Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom



300	Pemeliharaan jalan Dsn Waung Ds. Sonoageng - Dsn. Bendo Ds. Mojokendil Ngronggot
301	Penyemiran jalan aspal Dusun Sumbersari Desa mojokendil s/d Desa Cengkok
302	Pemeliharaan Jl. Jatikusumo menuju TPA Joho
303	Perbaikan jalan Citandui
304	Perbaikan jalan di Ds. Mabung - Ds. Katerban
305	Pemeliharaan jalan Ds. Garu
306	Perbaikan jalan Desa Sudimoroharjo-Jambi
307	Pengaspalan jalan (Hotmix) Banaran - Kenep
308	Pemeliharaan jalan poros desa Jatipunggur Sawahan di Jatisari
309	Pemeliharaan jalan poros Desa Nglinggo menuju Pandean di Besuki
310	Pemeliharaan jalan poros Pengkol Sonopatik
311	Pemeliharaan Jalan Patranrejo, Balongrejo Berbek
312	Pemeliharaan jalan Grojokan Sumberurip
313	Pemeliharaan Jalan Dsn. Beni Ds. Sumberkepuh
314	Pemeliharaan Jalan Dsn. Tawang Desa Kampungbaru
315	Pemeliharaan Jalan Dsn. Waung Desa Sonoageng - Dsn. Bendo Desa Mojokendil
316	Pemeliharaan Jalan Dsn. Sumbersari Ds. Mojokendil - Ds. Cengkok
317	Pemeliharaan Jalan Patihan - Sekaran
318	Pemeliharaan Jalan Kwagean - Nglaban
319	Pemeliharaan Jalan Putukrejo - Kenep
320	Pemeliharaan Jalan Poros Desa Duren Dsn Bomo Bakalan Ngebo
321	Pemeliharaan Jalan Poros Desa Kebonagung Dsn. Beran
322	Pemeliharaan Jalan Dsn. Bonagung Ds. Sumberkepuh
323	Pemeliharaan Jalan Dsn. Sambong Ds. Sumberkepuh
324	Pemeliharaan Jl. Agus Salim, Warujayeng
325	Rehabilitasi Jalan Patran - Miren, Warujayeng
326	Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar Gondang
327	Pemeliharaan jalan Joho - Cangkring Pacekulon
328	Perawatan jalan aspal Mlaten - Ngrami
329	Pemeliharaan jalan Sanggrahan ke Pondok Tegalrejo
330	Pemeliharaan Jalan Musi
331	Perbaikan jalan Gotong Royong Ds. Pelem
332	Pemeliharaan jalan poros desa Setren
333	Pemeliharaan berkala jalan Teuku Umar
334	Perbaikan jalan di Ds. Banjaranyar Kec. Tanjunganom
335	Perbaikan jalan Desa Mancon
336	Perbaikan Jalan Kelurahan Begadung
<b>IX</b>	<b>Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan</b>
337	Inspeksi kondisi jalan
338	Inspeksi kondisi jembatan
339	Survei Kerataan perkerasan jalan
340	Uji kekuatan Tanah untuk perencanaan jalan





<b>X</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>
341	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
342	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
343	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
<b>XI</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>
344	Pengadaan Tanah lahan pengganti lahan perhutani untuk relokasi warga terdampak Bendungan Semantok.
345	Operasional Komisi Irigasi
346	Inventarisasi Aset Tanah Pengairan
347	Pengadaan Papan Larangan
348	Penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG)
349	Pemeliharaan Pintu Air
350	Optimalisasi Operasional Prasarana Irigasi
351	Rehabilitasi Saluran Sekunder B2
352	Rehabilitasi Saluran Sekunder B16
353	Rehabilitasi Saluran Sekunder B17
354	Rehabilitasi Saluran KW13 a89
355	Rehabilitasi Saluran Sekunder B27 a195
356	Rehabilitasi Saluran Sekunder B1 a179
357	Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangtengah BKA 5-6
358	Rehabilitasi Saluran Sekunder Banaran Kiri BBR. 3
359	Rehabilitasi Bangunan Bagi BML. 11 Saluran Sekunder Mlilir
360	Pembinaan dan pemberdayaan GHIPPA
361	Normalisasi Saluran Sek B.5 kw.62
362	Rehabilitasi Saluran Sekunder Genjeng
363	Rehabilitasi Saluran Sekunder Sukomoro BSM.2-BSM.7
364	Rehabilitasi Saluran Pembuang B12 di desa Kelurahan
365	Rehabilitasi Saluran Pembuang B4 di desa Sambiroto
366	Pemeliharaan Bangunan Bagi BS1 -2
367	Normalisasi Saluran Sekunder Sengkut BS1 - BS2 dan BS4
368	Pemeliharaan Saluran Sekunder Sendangbumen
369	Rehabilitasi saluran KW.20 a.94
370	Rehabilitasi Sal. Sek. B.21 a.126
371	Rehabilitasi Sal. Sek. Sumberejo
372	Rehabilitasi Sal. Sek. Ketawang
373	Rehabilitasi saluran sekunder B.21 dan bangunan Pelengkapnnya KW.124
374	Rehabilitasi Saluran Sumbersongsong
375	Bimbingan Teknis Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
376	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
377	Pengawasan berkala pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
378	Biaya Penunjang Kegiatan DAK (APBD)



379	Rehabilitasi Saluran Sekunder Ngomben
380	Rehabilitasi Saluran Sekunder Ngrombot BNG 5 ka
381	Rehabilitasi Saluran Sekunder B. 25
382	Rehabilitasi Saluran Sekunder Senggowar Kanan SG. 6 Kiri
383	Peningkatan Saluran Pengambilan Sumber Sedati
384	Rehabilitasi Sal.Sek. B.9 a.37, a.43
385	Rehabilitasi Saluran Pembuang Sumbersono
386	Pemeliharaan Saluran Sekunder Ngaglik
387	Rehabilitasi Saluran Sekunder B.25 a.168
388	Rehabilitasi Saluran Sekunder Katogan
389	Rehabilitasi Saluran Sekunder Ngrambe Kiri
390	Rehabilitasi Saluran Sekunder Tampang
391	Rehabilitasi Saluran Sekunder Kwagean
392	Rehabilitasi Saluran Sekunder Jasem (JA.2 ki)
393	Rehabilitasi Saluran Sekunder Ngudikan Kiri (BNU.2)
394	Rehabilitasi Saluran Pembuang Mlilir
395	Pemeliharaan Saluran Sekunder Ngrami BNM.1 - BNM.3
396	Rehabilitasi Saluran Sekunder Loceret
397	Rehabilitasi Saluran Sekunder Maguan
398	Rehabilitasi Saluran Sekunder Berbek
399	Rehabilitasi Syphon Kedungsoko (DAK 2018)
400	Penyusunan Peta Daerah Irigasi
401	Rehabilitasi Saluran Sekunder B. 29
402	Rehabilitasi Saluran Sekunder Gambyok
<b>XII Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	
403	Rehabilitasi sayap Dam Girirejo
404	Rehabilitasi Dam rowo
405	Pemeliharaan Dam Tiripan
406	Pemeliharaan Pintu Spey dan Pintu Intake Dam Jetis
407	Rehabilitasi Dam Tirip
408	Rehabilitasi Dam Manggarejo
409	Normalisasi Waduk Sumberkepuh
410	Rehabilitasi Dam Nitis
411	Rehabilitasi Sayap Dam Tretes (DAK)
412	Normalisasi Embung Karangasem
413	Pengadaan Tanah Embung Bajang
<b>XIII Program Pengendalian Banjir</b>	
414	Normalisasi Saluran Pembuang B 6 (PIK)
415	Rehabilitasi Kali Kedungmaron (PIK)
416	Normalisasi A1 (PIK)
417	Normalisasi A.6 Desa Kaloran
418	Normalisasi A.3
419	Normalisasi A.5
420	Rehabilitasi Sal. Pembuang Sukomoro
421	Rehabilitasi Kali Konang



422	Normalisasi Dam Pojok
423	Rehabilitasi Saluran Pembuang Bodor
424	Normalisasi Kali Kedunggalih
425	Normalisasi Kali Kandang
426	Rehabilitasi Talud Kali Sumberkemiri
427	Normalisasi Saluran Pembuang Gondangkulon
428	Normalisasi A.17
429	Normalisasi A.18
430	Normalisasi A.14
431	Normalisasi Saluran Pembuang Logawe
432	Normalisasi Berm Slut A. 12
433	Pengawasan berkala pada Program Pengendalian banjir di kegiatan tahun 2018
434	Rehabilitasi A. 9
435	Normalisasi A.16
436	Normalisasi Waduk Sumbersono
437	Normalisasi A. 12
438	Rehabilitasi Saluran Pembuang Brumbung
439	Normalisasi Saluran Pembuang Patihan
440	Studi Kelayakan Sudetan Kali Lempoh ke Kali Widas
441	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ganggangmalang
442	Normalisasi Kali Wangan
443	Rehabilitasi Saluran Pembuang Panglima Sudirman
444	Rehabilitasi Saluran Pembuang Plosorejo
445	Rehabilitasi C. 5
446	Rehabilitasi C. 6
447	Normalisasi Kali Trincingan
448	Rehabilitasi Kali Songsong
449	Rehabilitasi Saluran Sekunder Ngubaran
450	Rehabilitasi Kali Kedungpedet
451	Rehabilitasi A.19
<b>XIV Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum</b>	
452	Pengurugan lapangan Kelurahan Kramat
453	Rehabilitasi dan penataan Stadion Warujayeng sebagai central kuliner
454	Pemeliharaan fasilitas umum
455	Pembangunan Pasar Kertosono
456	DED Renovasi Masjid Baitussalam Nganjuk
457	Pembangunan Taman Eks Kec. Kertosono (Lanjutan)
<b>XV Program Rehabilitasi, Revitalisasi dan Refungsionalisasi Bangunan dan Gedung Pemerintah.</b>	
458	Perbaikan atap dan plafond Balai Kelurahan Kramat
459	Rehabilitasi gedung serba guna Kelurahan Warujayeng
460	Pembangunan Tempat Parkir dan Gedung Kantor Inspektorat Kab. Nganjuk
461	Penataan Halaman Gedung Wanita



462	Penataan Halaman TK Pertiwi
463	Rehab gedung TK aset Desa Lengkong Lor
464	Rehab Mushola dan MCK Ds. Lengkong Lor
465	Pembangunan air mancur menari di Kec. Kertosono
466	Pemasangan plafon gedung kantor Kelurahan Warujayeng
467	Pembangunan tempat parkir kantor kecamatan Jaticalen (PIK)
468	Rehab gedung pertemuan Kantor Kecamatan Sawahan (PIK)
469	Rehab Pasar Loceret (PIK)
470	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk
471	Pembangunan Rumah Dinas Pemda Nganjuk di Jalan Mastrip
472	Rehabilitasi Rumah Dinas di Jl. Gondowardojo Nganjuk
473	Pembangunan Pasar Loceret dan Pasar Warujayeng (DAK Penugasan 2018)
474	Rehabilitasi Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk
475	Pembangunan Pagar Pasar Wage III
<b>XVI Program Perencanaan Tata Ruang</b>	
476	Persetujuan substansi dan legalisasi RDTR perkotaan Nganjuk
477	Persetujuan substansi dan legalisasi RDTR perkotaan Kertosono
478	Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 6 sub bidang antara lain sebagai berikut :

### a. Sub Bidang Sumber Daya Air

Sasaran dari jenis pelayanan dasar Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat adalah Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator dari jenis pelayan dasar ini adalah Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Adapun target dari jenis pelayanan dasar ini menurut Permen PU No. 01/PRT/M/2014 sebesar 60 %. Upaya pencapaian untuk memenuhi target tersebut dengan melakukan Pembangunan/peningkatan, rehabilitasi, serta O&P jaringan irigasi. Dinas PU dan Penataan Ruang melalui Bidang Pengairan dalam rangka memenuhi standard pelayanan minimal telah melaksanakan serangkaian program antara lain Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Pengendalian Banjir. Realisasi dari pelayanan standar minimal Dinas PU dan Penataan Ruang dengan indicator persentase kecukupan kebutuhan air irigasi adalah 77,86 %. Dengan demikian capaian pelayanan standard minimal Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar 129,77 %.

### b. Sub Bidang Jalan

Sasaran dari jenis pelayanan dasar Penyediaan jalan untuk kebutuhan masyarakat adalah Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/Kota. Indikator dari jenis pelayan dasar ini adalah Persentase tingkat kondisi jalankabupaten/kota baik dan sedang. Adapun target dari jenis pelayanan dasar ini menurut Permen PU No.

01/PRT/M/2014 sebesar 60 %. Upaya pencapaian untuk memenuhi target tersebut dengan melakukan pemeliharaan rutinan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI, setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/Roughmeter) untuk menentukan nilai IRI, Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat melakukan survey kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/Roughometer. Dinas PU dan Penataan Ruang melalui Bidang Bina Marga dalam rangka memenuhi standard pelayanan minimal telah melaksanakan serangkaian program antara lain Program Pembangunan jalan dan jembatan, Program pemeliharaan jalan dan jembatan, Inspeksi kondisi jalan dan jembatan. Realisasi dari pelayanan standar minimal Dinas PU dan Penataan Ruang dengan indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional adalah 78,35 %. Dengan demikian capaian pelayanan standard minimal Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar 130,58 %.

c. Sub Bidang Penataan Ruang

Sasaran dari jenis pelayanan dasar Informasi penataan ruang dan Penyediaan ruang terbuka hijau adalah Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang dan Meningkatkan ketersediaan RTH. Indikator dari jenis pelayanan dasar ini adalah Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan digital Dan Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Adapun target dari jenis pelayanan dasar ini menurut Permen PU No. 01/PRT/M/2014 sebesar 100 % dan 50 %. Upaya pencapaian untuk memenuhi target tersebut dengan melakukan percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah kabupaten/kota, penyediaan peta, publikasi di media massa mengenai peta yang telah tersedia dan Penertiban area yang direncanakan menjadi RTH, penganggaran peyediaan dan pengelolaan RTH publik. Dinas PU dan Penataan Ruang melalui Bidang Cipta Karya dalam rangka memenuhi standard pelayanan minimal telah melaksanakan serangkaian program antara lain Program perencanaan tata ruang. Dengan demikian capaian pelayanan standard minimal Dinas PU dan Penataan Ruang dapat dilihat melalui realisasi secara anggaran program perencanaan tata ruang.

No	Program Perencanaan Tata Ruang			
1	Persetujuan substansi dan legalisasi RDTR perkotaan Nganjuk	250.000.000,00	231.654.000,00	92,66
2	Persetujuan substansi dan legalisasi RDTR perkotaan Kertosono	250.000.000,00	226.911.000,00	90,76
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	19.680.000,00	39,36

d. Sub Bidang Cipta Karya dan Ijin Jasa Konstruksi

Untuk jenis pelayanan dasar di sub bidang Cipta Karya dengan sasaran meningkatnya tertib bangunan gedung (indikator sasaran persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan ) dan Ijin Jasa Konstruksi dengan sasaran Ijin Usaha jasa Konstruksi (Indikator sasaran persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap) secara tupoksi sudah beralih tugas ke **BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**.

**3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib.**

Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang program dan kegiatannya sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

**4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Kondisi kepegawaian pelaksana tugas bidang pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

**Jumlah Total Pegawai****Tabel 2.1**

U R A I A N	Satuan	Jumlah
<b>a. Jumlah PNS</b>		
1) Golongan I	Orang	33
2) Golongan II	Orang	170
3) Golongan III	Orang	68
4) Golongan IV	Orang	4
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>275</b>

**Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional****Tabel 2.2**

U R A I A N	Satuan	Jumlah
<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>		
- Eselon II	Orang	1
- Eselon III	Orang	4
- Eselon IV	Orang	33
<b>Jumlah Pejabat Fungsional</b>	Orang	-
<b>Jumlah Staf PNS</b>	Orang	237
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>275</b>

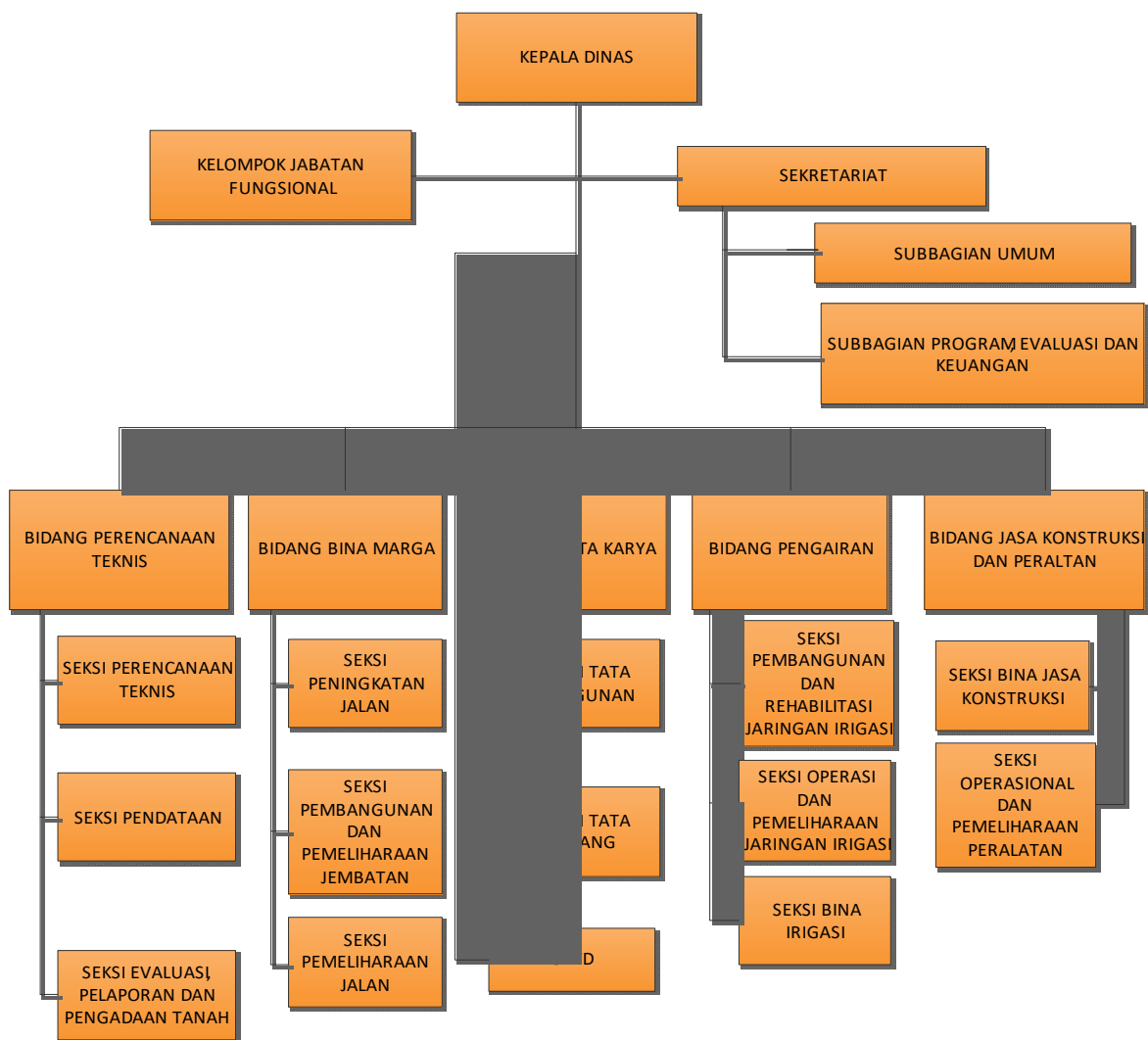
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan****Tabel 2.3**

No.	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	28
2	Lulusan SLTP	Orang	45
3	Lulusan SLTA	Orang	139
4	Lulusan Paket C	Orang	-
5	Lulusan KPAA	Orang	-
4	Lulusan D2	Orang	-
5	Lulusan Sarjana Muda/ D3	Orang	6
6	Lulusan S-1	Orang	49
7	Lulusan Pasca Sarjana/ S.2	Orang	8
8	Lulusan Pasca Sarjana/ S.3	Orang	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>275</b>



Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Tabel 2.4

No.	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	Orang	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	Orang	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	Orang	-
4	Pembina (IV/a)	Orang	3
5	Penata Tingkat I (III /d)	Orang	17
6	Penata (III /c)	Orang	23
7	Penata Muda Tingkat I (III /b)	Orang	19
8	Penata Muda (III /a)	Orang	9
9	Pengatur Tingkat I (II /d)	Orang	24
10	Pengatur (II /c)	Orang	99
11	Pengatur Muda Tingkat I (II /b)	Orang	3
12	Pengatur Muda (II /a)	Orang	45
13	Juru Tingkat I (I /d)	Orang	1
14	Juru (I /c)	Orang	31
15	Juru Muda Tingkat I (I /b)	Orang	1
16	Juru Muda (I /a)	Orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>Orang</b>	<b>275</b>

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN NGANJUK****Gambar 2.1  
SOTK Dinas PUPR**





**Tabel 2. 5**  
**Bagan Pelaksana Urusan Wajib**

Bagan Pelaksana Urusan Wajib												
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk												
Bidang Perencanaan Teknis			Bidang Bina Marga			Bidang Cipta Karya			Bidang Pengairan		Bidang Bina Jasa Konstruksi & Peralatan	
Kepala Seksi Perencanaan Teknis	Kepala Seksi Pendataan	Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Dan Pengadaan Tanah	Kepala Seksi Peningkatan Jalan	Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan	Kepala Seksi Tata Bangunan	Kepala Seksi Tata Ruang	Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kepala Seksi Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Seksi Bina Irigasi	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	Kepala Seksi Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan
Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana



**Tabel 2.6**  
**Kualifikasi dan Jumlah Pegawai**  
**Yang menangani Urusan Wajib Pekerjaan Umum**

No.	Jabatan	Pangkat / Golongan		Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda	IV/c	S2-ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	
2	Kepala Bidang Perencanaan Teknis	Pembina	IV/a	S1 Teknik	1	
3	Kepala Bidang Pengairan	Pembina	IV/a	S-2 MAGISTER ADM. PUBLIK	1	
4	Kepala Bidang Bina Marga	Pembina	IV/a	S1 Teknik	1	
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Penata Tingkat I	III/d	S-2 MAGISTER TEKNIK	1	
6	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan	Penata Tingkat I	III/d	S-2 MAGISTER ADM. PUBLIK	1	
7	Kepala Seksi Peningkatan Jalan	Penata Tingkat I	III/d	S. 1 Teknik Sipil	1	
8	Kepala UPTD PJJ Lobersanget (berbek)	Penata Tingkat I	III/d	S1- ILMU SOSIAL	1	
9	Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jarigan Irigasi	Penata Tingkat I	III/d	S-2 MAGISTER TEKNIK PENGAIRAN	1	
10	Kepala UPTD PJJ Golengnglulen (gondang)	Penata Tingkat I	III/d	S1-ILMU SOSIAL	1	
11	Kepala Sub Bagian Umum	Penata	III/d	S2-MAGISTER MANAJEMEN	1	
12	Kasi Tata Ruang	Penata Tingkat I	III/d	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	1	
13	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	Penata Tingkat I	III/d	D. III LPPU ITS	1	
14	Kepala UPTD PSDA Widas	Penata Tingkat I	III/d	s1-sos pol/adm negara	1	
15	Kepala UPTD PSDA Mrican Kiri	Penata Tingkat I	III/d	S1 Petanian	1	
16	Kepala UPTD PSDA Kunci	Penata Tingkat I	III/d	S1-SAP	1	
17	Kepala UPTD PSDA Bening (Gondang)	Penata Tingkat I	III/d	S-1 PERTANIAN	1	
18	Kepala UPTD PSDA BODOR (Pace)	Penata Tingkat I	III/d	S1-MANAJEMEN	1	
19	Kasubag TU UPTD PJJ Rebawil (bagor)	Penata Tingkat I	III/d	S1-PERTANIAN	1	
20	Kasubag TU UPTD PSDA Bening (gondang)\	Penata	III/c	S-1 Ilmu Administrasi Negara	1	
21	KasubagTU UPTD PSDA WIDAS	Penata	III/c	STM	1	



	(Nganjuk)					
22	Kasubag TU UPTD PSDA BODOR (Pace)	Penata	III/c	SPMA	1	
23	Kasubag TU UPTD PSDA MRICAN KIRI (Tanjunganom)	Penata	III/c	S1-PETERNAKAN	1	
24	Pj.Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Penata	III/c	S1 Teknik Sipil	1	
25	KASUBAG TU UPTD PJJ LOBERSANGET (berbek)	Penata	III/c	S1-TEKNIK SIPIL	1	
26	KASUBAG TU UPTD PJJ KERTOBAWORO (kertosono)	Penata	III/c	S1-TEKNIK SIPIL	1	
27	KASUBAG TU UPTD PJJ TANJUNGPABON (tanjunganom)	Penata	III/c	S1-TEKNIK SIPIL	1	
28	KASI PERENCANAAN TEKNIS	Penata	III/c	D-IV TEKNIK SIPIL	1	
29	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Penata	III/c	S-1 TEKNIK SIPIL	1	
30	Kepala Seksi Bina Irigasi	Penata	III/c	S-1 TEKNIK PENGAIRAN	1	
31	Kasi Tata Bangunan	Penata	III/c	S.1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	
32	Kepala Seksi Pendataan	Penata	III/c	S-1 TEKNIK SIPIL	1	
33	Kasi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah	Penata	III/c	S1-TEKNIK SIPIL	1	
34	Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan	Penata	III/c	STM	1	



## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen-tase	SKPD/Bagian/Bidang Pelaksana Kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.768.542.771	1.170.353.000	49.864.006.778	170.594.010.238	250.432.299.962	221.628.370.016	88,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## 6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum telah dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang program dan kegiatan dalam bidang pekerjaan umum cukup representatif dan telah memenuhi standar sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah.

## 8. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tidak terdapat permasalahan pokok, hanya ada kendala namun dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak mengganggu pekerjaan fisik.

## 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

--

## B. INDIKATOR KINERJA KUNCI

### 1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

#### 1.1 Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

##### a) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

Pada tahun 2018, jumlah Program Nasional berdasarkan RKP 2018 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebanyak 4 Program Nasional, yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebanyak 4 program. Sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

##### b) Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP)

Pada tahun 2018, telah ditetapkan 33 jenis Standart Operating Procedure (SOP) dan menjadi pedoman dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan publik, yaitu :

1. Mekanisme permohonan pengujian tanah dan bahan/material konstruksi
2. Unit rekasi cepat pemeliharaan jalan



3. Mengusulkan pemeliharaan dan pembangunan jalan atau jembatan
4. Melakukan pembersihan rumput pinggiran jalan
5. Melakukan pembersihan rumput pinggiran sungai
6. Laporan curah hujan
7. Mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
8. Penetapan pengadaan dan konstruksi pemeliharaan peralatan berat
9. Memberikan dan menerbitkan ijin usaha jasa konstruksi
10. Dokumen perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan
11. Dokumen perencanaan teknis kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
12. Penyusunan dokumen study kelayakan pembangunan jalan & jembatan
13. Penyusunan dokumen study kelayakan pemeliharaan jalan & jembatan
14. Dokumen kegiatan pembangunan
15. Dokumen kegiatan pemeliharaan
16. Rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB)
17. Memberikan analisa tingkat kerusakan bangunan gedung
18. Penataan lokasi pedangang kaki lima (PKL)
19. Perencanaan pemeliharaan gedung pemerintah
20. Memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang bersama dengan tim
21. Pengesahan perencanaan teknis bangunan gedung
22. Mengawasi pelaksanaan penataan ruang bersama dengan tim
23. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tata ruang
24. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah
25. Penyusunan dokumen study kelayakan
26. Pengadaan tanah skala besar (lebih dari 5 hektar)
27. Pengadaan tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 hektar)
28. Pengumpulan dan penghimpunan (inventarisasi) data teknis
29. Dokumen perencanaan teknis kegiatan
30. Pengajuan rekomendasi pemanfaatan tanah pengairan
31. Pengajuan rekomendasi bebas banjir
32. Dokumen kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi
33. Dokumen kegiatan operasi jaringan irigasi
34. Dokumen kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

### **1.2 Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

- a) Jumlah perda yang harus dilakukan OPD menurut Peraturan Menteri  
Pada tahun 2018 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk melaksanakan Perda sebanyak 4 jenis Perda, sedangkan jumlah perda yang seharusnya dilaksanakan juga terdapat 4 Perda. Sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100 %.

### **1.3 Aspek Penataan Kelembagaan Daerah**

- a) Ratio Struktur Jabatan dan Eselonering yang Terisi

Pada tahun 2018 jumlah jabatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebanyak 42 jabatan. Namun jabatan yang terisi sebanyak 38 jabatan, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 90,48 %.

- b) Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD

Untuk jenis jabatan fungsional di Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk sampai saat ini belum ada jabatan fungsional.

#### 1.4 Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

a) Rasio PNS Kabupaten

Pada tahun 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebanyak **275 personel**. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebanyak **9.130 personel**, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah **3,01 %**.

b) Pejabat yang telah Memenuhi Persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan

Pada tahun 2018, jumlah pejabat struktural yang ada pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebanyak **38 orang**, yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak **21 orang**, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah **55,26 %**.

c) Pejabat yang telah Memenuhi Persyaratan Kepangkatan

Pada tahun 2018, jumlah pejabat struktural yang ada pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebanyak 42 orang, 38 orang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 90,48 %.

#### 1.5 Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di SKPD

Dokumen Perencanaan Pembangunan yang ada pada Dinas PU dan Penataan Ruang Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 terdiri dari Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA-SKPD, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah ada 3 jenis dokumen perencanaan.

2. Jumlah Program RKPD yang Tidak Diakomodir dalam Renja SKPD

Pada tahun 2018, tidak ada Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 0 %.

3. Jumlah Program Renja SKPD yang Diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program Renja Dinas PU dan Penataan Ruang yang diakomodir dalam RKA Dinas Dinas PU dan Penataan Ruang sebanyak 17 program, dan jumlah Program dalam RKA Dinas Dinas PU dan Penataan Ruang sebanyak 17 program, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

4. Jumlah Program Renja SKPD yang Diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program Renja Dinas PU dan Penataan Ruang yang diakomodir dalam DPA Dinas Dinas PU dan Penataan Ruang sebanyak 17 program. Hal ini tidak sama dengan jumlah Program dalam DPA Dinas PU dan Penataan Ruang sebanyak 17 program, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

#### 1.6 Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Anggaran SKPD terhadap Total Belanja APBD Pada Tahun 2018, Anggaran Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 250.432.299.962,00 Sedangkan total belanja APBD Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 2.617.124.429.605,65 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 9,57 %.

b. Belanja Modal terhadap Total Belanja SKPD, Belanja Modal Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 170.594.010.238,00 Sedangkan total belanja Dinas PU dan Penataan Ruang Rp. 250.432.299.962,00 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 68,11 %.

c. Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan Jasa



Total Belanja Pemeliharaan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 101.167.344.012,00. Sedangkan total Belanja Barang dan Jasa Dinas sebesar Rp. 49.864.006.778,00 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 202,89 %.

d. Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja SKPD

Total Belanja Pemeliharaan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 250.432.299.962,00. Sedangkan total belanja Dinas sebesar Rp 221.628.370.016,00 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 40,40 %.

e. Keberadaan Laporan Keuangan SKPD

Pada tahun 2018, Laporan Keuangan yang ada pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk terdiri atas LRA, Laporan Operasional, Jurnal, Neraca, dan CaLK, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah ada Laporan Keuangan sebanyak 5 jenis.

### 1.7 Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD

Inventarisasi barang atau asset SKPD yang dilaksanakan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2018 dituangkan dalam dokumen-dokumen :

- a. Buku Inventaris
- b. Rekapitulasi Buku Inventaris
- c. Kartu Inventaris Barang
- d. Laporan Mutasi Barang

Dengan demikian, capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah ada 4 jenis inventarisasi barang atau asset SKPD.

b. Jumlah yang Tidak Digunakan oleh SKPD

Pada tahun 2018, Asset yang dikuasai Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sebanyak Rp2.650.175.774.155,16. Tidak terdapat asset yang tidak digunakan.

Dengan demikian, capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah 100%.

### 1.8 Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

a) Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi

Pada Tahun 2018, Dinas Pertanian PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk telah menyediakan fasilitas/prasarana informasi untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui :

- Papan pengumuman ;
- Pos Pengaduan (Kotak Saran) ;
- Mobil URCPJ;
- Leaflet/Brosur ;

Sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah sebanyak 4 jenis.

b) Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2018, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk terhadap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survey, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun instrument survey
- Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
- Menentukan responden



- 🎯 Melaksanakan survey
- 🎯 Mengolah hasil survey
- 🎯 Menyajikan dan melaporkan hasil

Sehingga capaian kinerja untuk indicator kinerja ini adalah sebanyak 6 jenis.

## **2. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan**

### **2.1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum**

- a) Panjang Jalan Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik Tahun 2018 adalah sepanjang 960,078 Km (Data pendukung terlampir), sedangkan total panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 1153,482 Km, sehingga Capaian Kinerja untuk Kegiatan ini adalah 83,23 %.
- b) Luas irigasi Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik pada Tahun 2018 seluas 13.218 Ha (Data pendukung terlampir), sedangkan total luas irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk seluas 14.951 Ha, sehingga Capaian Kinerja untuk Kegiatan ini adalah 88,41 %.





### BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2018 telah diupayakan secara optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan umum dan otonomi daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Dinamika yang berkembang selama ini merupakan suatu tuntutan dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif didalam setiap tindakan dan merupakan konsekwensi adanya perubahan-perubahan yang mendasar dari masyarakat yang tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Penggeseran paradigma tersebut menuntut adanya komitmen dari setiap penyelenggara pemerintahan di Daerah guna meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam pengelolaan potensi daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun selalu dijadikan pijakan dalam keberlanjutan perencanaan, penggaran, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 telah diupayakan secara optimal berdasarkan kondisi obyektif hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018. Melalui laporan ini semoga dapat dijadikan sebagai gambaran dan penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta apa yang telah dilaksanakan dapat diterima sebagai acuan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

Sebagai salah satu bentuk kepedulian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk terhadap pembangunan di Kabupaten Nganjuk maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk merekomendasikan adanya kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat yaitu membangun infrastruktur bidang pengairan, fasilitas umum dan membangun jalan dan jembatan untuk akses menuju pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di Kabupaten Nganjuk, membangun memperbaiki Jalan Kabupaten yang rusak sehingga kembali dalam kondisi baik, dan menerima usulan/masukan dalam pembangunan dan pemeliharaan dari masyarakat melalui Musrenbang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang jalan , jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan public merupakan wujud kerja keras dan kesungguhan secara terus menerus dan terpadu antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dan dukungan dari partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk menyadari bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan khususnya bidang jalan , jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan public sangat jauh dari sempurna hasilnya, hal ini disamping karena kendala pendanaan yang terbatas juga karena faktor-faktor lainnya, sehingga perlunya selalu adanya evaluasi sehingga memotivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih baik dalam memberikan pelayanan bidang jalan dan bidang jasa konstruksi lebih baik lagi, semoga Allah SWT memberkahi setiap upaya baik kita, Aamiin.